

PERISTIWA PENGKUDETAAN PRESIDEN SOEHARTO PADA TAHUN 1998: STUDI PEMIKIRAN K.H. MAIMOEN ZUBAIR

Oleh:

Muhammad Rizky Ramadhani¹

Rahmad Ramadhani²

Nur Rahmah³

UIN Raden Intan Lampung

Alamat: Jl. Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota
Bandar Lampung, Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: inirizky357@gmail.com, dhanirama3736@gmail.com,
Nurrahmah@radenintan.ac.id

***Abstract.** The fall of President Suharto in May 1998 marked the end of the New Order regime that had ruled Indonesia for more than three decades. This study aims to analyze the factors causing Suharto's downfall from a political, economic, and social perspective. The method used is a normative juridical research study, namely research whose assessment is based on legal norms, applicable laws and regulations, legal theory and doctrine, jurisprudence and other literature relevant to the research topic. Using a normative juridical approach, the data sources used in this study are secondary data, which are in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis in this study uses qualitative descriptive, namely by analyzing the research data obtained for further in-depth study. The results of the study indicate that the combination of the 1997–1998 Asian monetary crisis, increasing pressure from the student reform movement, and the weakening of political legitimacy amidst the practice of corruption, collusion, and nepotism (KKN) were the main triggers for the collapse of Suharto's power. Furthermore, fragmentation within the military and the loss of support from the political elite accelerated the transition of power. This study concludes that Suharto's downfall resulted from an accumulation of multidimensional crises that the authoritarian structure of the New Order was unable to address.*

Received July 02, 2025; Revised July 17, 2025; July 28, 2025

*Corresponding author: inirizky357@gmail.com

PERISTIWA PENGKUDETAAN PRESIDEN SOEHARTO PADA TAHUN 1998: STUDI PEMIKIRAN K.H. MAIMOEN ZUBAIR

Keywords: *Soeharto, Crisis, K.H. Maimoen Zubair.*

Abstrak. Lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998 menandai berakhirnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kejatuhan Soeharto dari perspektif politik, ekonomi, dan sosial. Metode yang digunakan adalah studi penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang pada pengkajiannya mendasarkan pada norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis dalam Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yakni dengan menganalisis data penelitian yang diperoleh untuk selanjutnya dikaji secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi dari krisis moneter Asia 1997–1998, meningkatnya tekanan dari gerakan reformasi mahasiswa, serta melemahnya legitimasi politik di tengah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi pemicu utama runtuhnya kekuasaan Soeharto. Selain itu, fragmentasi di tubuh militer dan hilangnya dukungan elite politik turut mempercepat proses transisi kekuasaan. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa lengsernya Soeharto adalah hasil dari akumulasi krisis multidimensional yang tidak mampu diatasi oleh struktur otoriter Orde Baru.

Kata Kunci: Soeharto, Krisis, K.H. Maimoen Zubair.

LATAR BELAKANG

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 merupakan perubahan drastis yang mengubah kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998, di mana kala itu pemerintah orde baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada 19 Mei 1998, Soeharto bertemu dengan sejumlah tokoh Islam, termasuk Nurcholis Madjid dan Gus Dur. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh menyampaikan situasi terkini dan mendesak Soeharto untuk mundur. Soeharto menolak permintaan tersebut, namun ia menawarkan pembentukan Komite Reformasi. Rezim Orde baru pimpinan Soeharto dikenal represif terhadap ulama, terutama ulama pesantren.

Masa Orde Baru juga masa di mana ulama “ditindas” secara sosial maupun secara politik. Ulama harus menerima program-program pemerintah, jika tidak ancaman kekerasan, pengucilan hingga pemenjaraan pun di depan mata. Karena prinsip kemandirian dan keteguhan senantiasa menjadi pegangan para ulama sejak zaman penjajahan. Justru para ulama dengan prinsip perjuangan kemanusiaan terus melakukan perlawanan terhadap rezim korup dan tidak demokratis di era Presiden Soeharto. Pada era 1980 hingga 1990-an, tokoh NU yang getol melawan rezim Soeharto adalah KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bahkan di ruang publik maupun di media massa, Gus Dur dengan pemikiran-pemikirannya yang kerap mengkritik Soeharto yang dinilai mematikan demokrasi dan sering melakukan pembungkaman.

Namun pada akhirnya, kepemimpinan Soeharto berada di ujung tanduk karena terjadi krisis ekonomi pada 1997. Di saat itulah beberapa ulama atau kiai mendorong suksesi Orde Baru untuk mengakhiri rezim korup Orde Baru. Abdul Mun'im DZ mencatat bahwa melihat situasi sosial yang semakin anarkis dan situasi politik yang semakin kacau, kalangan ulama NU mengadakan pertemuan di Pesantren Langitan, Jawa Timur. Mereka sependapat bahwa situasi kacau ini harus segera diakhiri. Sementara pemerintahan yang berkuasa, Presiden Soeharto dinilai telah tidak lagi mampu menguasai keadaan. Ini berarti pemimpin tidak bisa lagi mengemban amanah kepemimpinan. Dalam keadaan begini, sebagai pemimpin, Soeharto disarankan untuk mengundurkan diri. Pemikiran itu disepakati oleh hampir semua ulama yang hadir, antara lain Kiai Idris Marzuki, Kiai Abdullah Fakhri, Kiai Sholeh Qosim, Kiai Muchit Muzadi dan sebagainya. Tetapi ada satu Ulama dari Sarang yang menolak keputusan itu yaitu K.H. Maimoen Zubair, dengan alasan Presiden sebagai Waliyul Amri tidak bisa dimakzulkan di tengah jalan begitu saja, kecuali beliau dengan tegas menyatakan ketidakmampuannya. Para ulama lain menilai, pemikiran K.H. Maimoen itu fiqih Sentris yang tidak mempertimbangkan Illat (sebab-sebab) sosial dan politik. Sementara para ulama yang lain melihat bahwa ke-mudhorot-an (bahaya) yang ditimbulkan seandainya Soeharto masih berkuasa akan lebih besar, selain rakyat tidak lagi menghendaki karena dianggap zalim, represif dan sebagainya. Soeharto juga terbukti tidak lagi mampu menguasai keadaan, bahkan para pendukungnya sendiri sudah tidak mendukung beliau lagi.

METODE PENELITIAN

PERISTIWA PENGKUDETAAN PRESIDEN SOEHARTO PADA TAHUN 1998: STUDI PEMIKIRAN K.H. MAIMOEN ZUBAIR

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang pada pengkajiannya mendasarkan pada norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis dalam Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yakni dengan menganalisis data penelitian yang diperoleh untuk selanjutnya dikaji secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lengsernya Presiden Soeharto

Berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto yang ditandai dengan pembacaan surat pengunduran diri tanggal 21 Mei 1998 merupakan kejadian yang bersejarah bagi bangsa Indonesia karena Presiden Soeharto adalah Presiden yang sangat lama memimpin Indonesia yaitu selama 32 tahun. Banyak Faktor atas lengsernya Presiden Soeharto antara lain adalah krisis ekonomi, krisis politik, krisis keamanan, krisis sosial budaya. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang bermula dari Thailand menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi menurun terhadap dollar AS. Turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mengakibatkan mahalnya harga-harga bahan pokok di pasar, seperti beras, minyak dan banyaknya PHK, meningkatnya angka pengangguran serta meningkatnya tindak kriminalitas. Keadaan tersebut mendorong mahasiswa menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut presiden Soeharto. Krisis Ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997 menyebabkan terjadinya pergolakan dalam tatanan politik dan keamanan bangsa Indonesia, akibatnya timbul tekanan dari rakyat agar dilakukan pergantian kepemimpinan nasional untuk menangani krisis ekonomi dan memperbaiki perpolitikan bangsa Indonesia. Keresahan dalam mempertahankan hidup menjadi keresahan massal di berbagai tempat. Rakyat mengamuk di Ibukota mengambil barang-barang apa saja yang bisa mereka bawa untuk mempertahankan hidup. Para pelaku kriminalitas melakukan pembakaran semau mereka. Sasaran utama para pelaku kriminalitas adalah etnis Cina yang selama ini lebih menguasai perekonomian Indonesia.¹

¹ Benedict Anderson, "Exit Suharto," *Asia-Pacific Journal*, Volume 6 Issue 6 (7 Mei 2025): menganalisis kesudahan rezim Soeharto dari perspektif politik dan budaya politik era Reformasi.

Penyebab Lengsernya Presiden Soeharto

Banyak penyebab jatuhnya kekuasaan Soeharto yang telah berlangsung selama 32 tahun:

1. Krisis Moneter

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 menimbulkan dampak buruk di berbagai sektor. Total utang luar negeri pada Maret 1998 mencapai 138 miliar dolar AS, utang swasta sekitar 72,5 miliar dolar AS yang dua pertiganya merupakan utang jangka pendek yang jatuh tempo pada 1998, padahal saat itu cadangan devisa yang dimiliki sekitar 14,44 miliar dolar AS. Dampak dari krisis ini adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang saat itu mencapai Rp. 17.000/dolar AS atau terdepresiasi lebih dari 80 persen sejak Agustus 1997, penurunan pada pasar uang dan pasar modal, serta kesulitan dialami oleh bank-bank nasional. Hal tersebut menyebabkan sekitar lebih dari 70 persen perusahaan skala kecil sampai besar yang tercatat di pasar modal mengalami kebangkrutan karena kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Padahal kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru ditujukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro dimana inflasi (Harga naik) atau deflasi (harga turun) dengan tujuan stabilitas harga di akhir. Titik balik kekuasaan Soeharto terjadi saat krisis moneter Asia melanda kawasan pada tahun 1997. Nilai tukar rupiah jatuh drastis dari sekitar Rp2.400 per dolar AS menjadi lebih dari Rp15.000 per dolar dalam hitungan bulan. Inflasi melonjak, PHK massal terjadi, dan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, menyebabkan penderitaan besar di kalangan masyarakat. Krisis ini tidak hanya memperlihatkan rapuhnya fondasi ekonomi Indonesia, tetapi juga menyoroiti buruknya tata kelola pemerintahan. Ketidakmampuan pemerintah untuk merespons secara efektif krisis ekonomi memperburuk keadaan. IMF masuk dengan memberikan paket bantuan, namun reformasi struktural yang disyaratkan memperlihatkan resistensi dari kalangan dalam kekuasaan Soeharto, terutama yang berkaitan dengan transparansi ekonomi dan pembubaran monopoli kroni.

Kebijakan moneter sendiri adalah bagian dari kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan kas negara atau pendapatan nasional dengan mengubah total peredaran uang di masyarakat. Pemerintah harus memperbaiki sistem keuangan kredit sebagai langkah awal kebijakan moneter yang mana sama dengan politik

PERISTIWA PENGKUDETAAN PRESIDEN SOEHARTO PADA TAHUN 1998: STUDI PEMIKIRAN K.H. MAIMOEN ZUBAIR

moneter yang berusaha memperbaiki keseimbangan moneter di Indonesia. Dalam prakteknya di Indonesia, mekanisme transmisi kebijakan moneter yang diberlakukan oleh bank Indonesia sebagai pemegang otoritas kegiatan perekonomian dan keuangan adalah topik hangat dalam perbincangan masyarakat, sebab tujuan BI atau Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah serta kestabilan harga atau inflasi. Di akhir pemerintahan Orde Baru, faktor lain selain krisis moneter juga dikarenakan desakan dan tuntutan masyarakat serta golongan mahasiswa agar dilakukan reformasi di berbagai bidang kehidupan. Krisis moneter membawa banyak dampak buruk dalam kondisi ekonomi Indonesia, pasalnya terjadi kelaparan di berbagai pelosok tanah air ini menyulut simpati beberapa golongan diantaranya golongan mahasiswa. Terutama dengan adanya isu KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang ada dalam pemerintahan Orde Baru, disamping tuntutan reformasi ekonomi, politik, serta hukum. Terlahirlah gerakan mahasiswa yang mana merupakan implementasi gerakan sosial mahasiswa dari pemikiran mahasiswa, di mana gerakan ini menuntut perbaikan dalam tatanan pemerintahan Orde Baru serta reformasi untuk Indonesia. Gerakan ini hadir akibat guncangan dalam sistem politik nasional yang menjadi bukti kelemahan posisi negara atas rakyatnya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan gejala kemiskinan yang terjadi secara massal atau tersebar baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan sekalipun, sarana dan prasarana ekonomi mengalami kehancuran dimana implikasinya adalah pada kehancuran ekonomi serta peningkatan hutang diikuti hilangnya fungsi nyata sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, serta modernisasi di negara Indonesia.

Menjelang akhir pemerintahannya, Presiden Soeharto mulai ditinggalkan pembantu-pembantunya di Kabinet. Tanggal 20 Mei Harmoko dan anggota-anggota Golkar yang dulu loyal pada Soeharto mengancam Presiden untuk diminta pertanggung jawabannya melalui sidang istimewa MPR. Dua Mantan wakil Presiden Soeharto Letjen Sudharmono dan Jenderal Try Soetrisno juga meninggalkan mantan bosnya. Soeharto tidak lagi mampu membujuk siapa pun untuk bergabung dalam pemerintahannya atau komite reformasi yang diusulkannya. Basis kekuatan Soeharto yang sudah berantakan itu memicu keengganan pihak militer untuk membantu Presiden. Pada saat itu pula dukungan internasional kepada Soeharto untuk bertahan

juga sudah sirna. Menlu Amerika Serikat Madelaine Albright sebelum tengah malam menyiarkan pernyataan melalui jaringan televisi CNN agar Soeharto mundur demi kepentingan transisi menuju demokrasi. Menteri Luar negeri melakukan hal tersebut karena menyesal dan kecewa terhadap kejadian Trisakti 12 Mei 1998. Menteri pertahanan menyerukan agar semua kerjasama militer AS dengan ABRI dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Soeharto tambah tergoncang saat para menterinya yang dipimpin oleh Akbar Tanjung dan Ginandjar Kartasasmita, mengadakan rapat dan menyusun pernyataan bahwa mereka tidak bersedia menjabat dalam kabinet baru serta mendesak Presiden untuk turun. Soeharto memerintah Mensesneg Saadillah Mursjid untuk segera mempersiapkan proses pengunduran dirinya sebagai Presiden secara konstitusional. Soeharto juga memerintahkan agar pengunduran dirinya dilakukan di istana Merdeka. Massa bersorak gembira saat mendengar bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatannya. Kamis tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya yang kemudian dilanjutkan pelantikan dan pengambilan sumpah BJ. Habibie untuk jabatan Presiden RI di hadapan para pejabat negara.² Setelah Soeharto usai membacakan surat pengunduran dirinya secara langsung dilakukan upacara sumpah pengangkatan BJ. Habibie sebagai presiden RI. Pada tahun 1997, Indonesia menjadi negara yang paling terpukul oleh krisis keuangan. Perekonomian mengalami pelarian modal asing yang menyebabkan Rupiah jatuh dari Rp2.600 per dolar pada bulan Agustus 1997 menjadi lebih dari Rp14.800 per dolar pada bulan Januari 1998. Perusahaan-perusahaan Indonesia dengan pinjaman dalam mata uang dolar AS berjuang untuk melunasi hutang ini dengan pendapatan rupiah mereka, dan banyak yang bangkrut. Kelemahan ekonomi Indonesia, termasuk tingkat utang yang tinggi, sistem pengelolaan keuangan yang tidak memadai, diidentifikasi sebagai penyebab mendasar. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan malapetaka bagi kekuasaan Soeharto, karena adanya krisis ekonomi Soeharto kehilangan sumber potensial untuk memperkuat legitimasi bagi kekuasaannya karena pemerintahan Soeharto selama berkuasa hanya mengandalkan legitimasi kinerja ekonomi bukan legitimasi moral

² Abdul Gafur, *Hari-hari Terakhir Seorang Presiden*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 1-2.

PERISTIWA PENGKUDETAAN PRESIDEN SOEHARTO PADA TAHUN 1998: STUDI PEMIKIRAN K.H. MAIMOEN ZUBAIR

dan prosedural, maka krisis ekonomi merupakan pemicu utama menurunnya legitimasi Soeharto. Soeharto kehilangan kepercayaan dari rakyat sehingga terjadi protes sosial yang meluas. Rakyat menuntut agar Presiden Soeharto segera turun dari jabatannya. Gerakan sektor massa yang massif dan berskala besar ini menimbulkan kepanikan di tingkat elite yang dekat dengan Soeharto sehingga mereka lari meninggalkan Soeharto sendiri menghadapi massa yang semakin besar. Protes sosial yang meluas merupakan ungkapan kekecewaan massa terhadap berbagai kebijakan dan tindakan politik yang dibangun Soeharto selama berkuasa yang selalu menghalau dan menyingkirkan massa.³

2. Kerusuhan

Pada 9 Mei, Soeharto meninggalkan Indonesia untuk menghadiri KTT di Kairo Mesir. Sementara itu, di Jakarta, mahasiswa Universitas Trisakti berencana melakukan aksi unjuk rasa menuju Kompleks Parlemen, namun aparat keamanan melarang mereka keluar dari kampus universitas tersebut. Mahasiswa kemudian melakukan aksi duduk di luar gerbang kampus, di situ pria berseragam Polisi muncul di flyover menghadap ke Trisakti. Mereka menembaki mahasiswa yang menewaskan empat orang (Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie), dan melukai puluhan lainnya. Dalam Tragedi ini pelanggaran Hak Asasi Manusia memang sangat bertentangan dengan adanya hukum yang sudah berlaku di negara ini, Akan tetapi, masih sangat banyak ditemukan kasus pelanggaran akan HAM ini sendiri di Indonesia, Dan salah satu contoh dari pelanggaran HAM yang ada di Indonesia adalah Tragedi Trisakti 1998 ini, yang mana tragedi Trisakti ini melanggar atau menentang adanya jaminan Hak asis yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 28A.⁴ Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28A yang bertuliskan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya jaminan hak seseorang untuk hidup. Namun, dengan adanya tragedi Trisakti ini, para anggota Polisi atau TNI yang terlibat

³ M. Zahrin Piliang, “Pengelolaan Ekonomi Indonesia: Pengalaman Orde Baru,” *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2 No. 1 (2023): menjelaskan intervensi ekonomi Soeharto melalui liberalisasi, hubungan dengan IMF, dan dampak sosial-ekonomi jangka panjang.

⁴ *Sejarah Tragedi Penembakan Mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998*, *Kompas.com* (13 Mei 2022), mengonfirmasi serpihan peluru kaliber 5,56 mm ditemukan dalam tubuh salah satu korban, serta bahwa penyidik belum berhasil mengungkap pelaku utama.

banyak merenggut nyawa beberapa mahasiswa yang mana melanggar adanya jaminan untuk hidup bagi seluruh umat manusia. Tak cukup dari itu, mereka bahkan memukuli dan menembak para mahasiswa dengan brutal, maka dapat dibulatkan bahwa tragedi ini sudah sangat bertentangan dengan adanya UUD 1945 Pasal 28A itu tersendiri.

Perlu diperjelas kembali bahwa bentuk HAM yang terdapat dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut: Hak untuk hidup, Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak mengembangkan diri, Hak memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintahan, Hak wanita, Hak anak. Dari bentuk Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, tragedi ini sangat bertentangan bentuk HAM nomor 1 yaitu Hak untuk hidup dan nomor 4 yaitu Hak untuk memperoleh keadilan juga nomor 7 Hak atas kesejahteraan. Tragedi Trisakti yang sukses merenggut beberapa nyawa dari mahasiswa ini memberikan banyak dampak negatif yang cukup berpengaruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain turunnya presiden kedua kita pak Soeharto dari jabatannya, terdapat beberapa dampak lain yaitu tewasnya beberapa mahasiswa dari Trisakti, lalu adanya kelumpuhan perdagangan dari beberapa etnis tionghoa di Indonesia, yang mana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang multikultur dan salah satu dari banyaknya etnis tersebut terdapat etnis tionghoa yang ingin membangun bisnis mereka di Indonesia, namun itu semua dilumpuhkan dalam sekejap, lalu selanjutnya dikeluarkannya TAP MPR No.XXVII/MPR/1998 Tahun 1998, runtuhnya orde baru ini membuat Indonesia mengakhiri masa rezim militer. Era baru demokrasi dan Hak Asasi Manusia pun lahir sebagai penggantinya. Lalu adanya Krisis moneter yang melanda negara Indonesia adalah kejadian terbesar yang pernah dialami oleh mayoritas masyarakat akibat adanya serangkaian kebijakan ekonomi pemerintah. Berbagai permasalahan timbul bersamaan dalam kurun waktu dua tahun saat inflasi sedang tinggi - tingginya, yang mana mulai bermunculan banyak variasi problematika baru contohnya seperti komplikasi penyakit manusia. Dimana masalah yang ada saat itu terlambat diurus atau tidak tepat penanganannya yang mengakibatkan terjadinya akumulasi permasalahan dan tugas penting kepada pemerintahan Indonesia. Krisis moneter yang melanda Indonesia berawal dari Krisis Moneter regional di belahan

PERISTIWA PENGKUDETAAN PRESIDEN SOEHARTO PADA TAHUN 1998: STUDI PEMIKIRAN K.H. MAIMOEN ZUBAIR

Asia Tenggara saat Thailand melakukan devaluasi mata uang Bath. Dampaknya pada Indonesia timbul saat nilai tukar mata uang rupiah mengalami penurunan drastis pada tahun 1998.⁵ Hal ini menyebabkan krisis akibat degradasi nilai tukar mata uang rupiah yang berdampak pada seluruh bidang, terutama pada sektor perbankan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Disinilah pemerintah mengambil kebijakan mendasar yang terdiri dari kestabilan keuangan, pengetatan likuiditas, penghematan dan penyesuaian struktural melalui liberalisasi perdagangan dan intervensi. Krisis ekonomi tetap terjadi meski dasar vital perekonomian

Indonesia pada masa itu terlihat kuat dan dipuji oleh Bank Dunia, namun kelemahan dalam struktur menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan lebih. Akibat yang harus ditelan pemerintah dalam krisis ini pun tidak ringan, sebab harga yang harus dibayarkan adalah jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto yang telah berjalan selama 32 tahun. Krisis menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pembangunan nasional yang mengikuti kebijakan ekonomi yang ada. Taktik yang digunakan dengan mengutamakan pertumbuhan yang disangga oleh negara-negara luar tidak efektif menahan getaran eksternal Indonesia, memperlihatkan ada sesuatu yang janggal dalam proses pembangunan nasional yang dicecerkan. Pembangunan yang beralaskan pada trilogi pembangunan tidak sesuai dengan konsep REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun yang dibuat oleh pemerintah, karena lebih berpijak pada stabilitas nasional, pertumbuhan, dan pemerataan.⁶

Ketiga poin dalam trilogi pembangunan sangat merasuk dalam kepemimpinan Presiden Soeharto di era Orde Baru, yang dimana dengan melaksanakan ketiganya pemerintah berharap pada konsepsi paradigma serta asosiasi dari trilogi pembangunan yang dijalankan. Dimana dengan mengontrol stabilitas nasional akan mewujudkan lingkungan yang baik, baik perekonomian sebelum pemerintah menarik investor asing untuk membangkitkan perekonomian nasional, setelahnya kesejahteraan akan diratakan ke seluruh wilayah Indonesia dengan baik. Kematian mahasiswa tersebut memicu kekerasan massal dan kerusuhan di seluruh Jakarta

⁵ Emil Salim, *Mengatasi Krisis dan Menata Ulang Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 32.

⁶ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 30.

keesokan harinya, memaksa Soeharto untuk kembali pada 14 Mei. Meskipun Soeharto kembali, kerusuhan terjadi di seluruh kota. Di Jatinegara, Jakarta Timur, sebuah department store Matahari dibarikade dan dibakar, menewaskan sekitar seribu orang. Di Glodok Jakarta Barat, massa menyerang Pecinan Jakarta, pemilik toko dipaksa membayar preman lokal untuk melindungi mereka dari kekerasan. Kerusuhan juga terjadi di dekat pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, Kota Tangerang, Banten, dan Kebayoran Baru di Jakarta Selatan, dengan properti milik Tionghoa menjadi target utama. Keamanan Indonesia seringkali mendapat sorotan dari dunia internasional yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Contoh kasus yang ramai diperbincangkan hingga sampai ke luar negeri adalah kasus Marsinah yang terjadi pada bulan Mei 1993, Marsinah seorang aktivis buruh wanita yang diculik kemudian diperkosa secara brutal dan disiksa hingga tewas. Bahkan, Soeharto mendapatkan peringatan langsung dari negara-negara barat mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Dili pada tanggal 12 November 1991. Dimana ABRI tampak menembaki puluhan warga sipil Timor Timur di pemukiman Santa Cruz. Akibat kejadian ini banyak korban yang berjatuh ada 19 orang terbunuh dan 50 orang mengalami luka-luka. Peristiwa penembakan empat mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998 yang kemudian diikuti dengan kerusuhan besar di ibukota Jakarta dari 13-15 Mei mencapai puncaknya pada tanggal 18 Mei 1998 saat mahasiswa menduduki gedung DPR RI. Ketika massa di luar gedung melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan tuntutan, di dalam gedung DPR pimpinan DPR dan fraksi-fraksi mengadakan rapat dengan mahasiswa yang diwakili oleh Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se Jabotabek (FKSMJ) untuk membahas situasi bangsa. Keputusan tersebut diambil mengingat keadaan bangsa Indonesia semakin tidak terkendali dan sangat membahayakan kesatuan bangsa. Siangnya masyarakat tiba-tiba dikejutkan dengan pernyataan Harmoko yang sebelumnya sangat dikenal sebagai pengikut setia Soeharto menyerukan kepada Presiden agar mengundurkan diri demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pukul 15.20 WIB, ketua DPR RI Harmoko yang didampingi para Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metaareum (F-PP), Abdul Gafur (F-KP), Fatimah Achmad (F-PDI), dan Syarwan Hamid (F-ABRI), menyatakan bahwa sebaiknya presiden Soeharto lebih baik mengundurkan diri. Keesokan hari tanggal 19 Mei 1998 pukul 09.00 di Gedung MPR/DPR diselenggarakan Rapat Pimpinan

PERISTIWA PENGKUDETAAN PRESIDEN SOEHARTO PADA TAHUN 1998: STUDI PEMIKIRAN K.H. MAIMOEN ZUBAIR

DPR dan pimpinan fraksi-fraksi untuk membahas soal permintaan pimpinan DPR kepada Presiden Soeharto untuk mundur yang dikemukakan Ketua DPR Harmoko. Pertemuan yang berlangsung selama lima jam ini akhirnya pimpinan fraksi-fraksi mendukung permintaan pimpinan DPR kepada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri secara hormat dan dilaksanakan secara konstitusional. Harmoko dan pimpinan MPR kembali meminta Soeharto untuk mundur pada tanggal 20 Mei. Presiden Soeharto menolak mundur dari jabatannya sehingga Harmoko memberi ultimatum kepada Soeharto, mundur pada hari jum'at atau menghadapi siding istimewa pada hari Senin. Soeharto akhirnya mau menyerah setelah menerima jaminan bahwa keluarga dan hartanya akan dilindungi.

Pemikiran K.H. Maimoen Zubair

Salah satu Kiai yang terlibat dalam aktivitas politik di Indonesia adalah KH Maimun Zubair. KH Maimun Zubair merupakan ulama kharismatik yang memiliki keluasan ilmu dan kebijaksanaan serta rendah hati. Beliau dikenal sebagai sosok yang bisa di terima oleh semua golongan, beliau juga selalu ramah terhadap siapapun, terutama terhadap tamu, beliau tidak memandang latar belakang siapapun, semua beliau perlakukan dengan sangat penuh hormat. KH Maimoen Zubair ini selama hidupnya telah merawat komitmennya terhadap politik kebangsaan di Indonesia.⁷ Melalui banyak pemikiran dan kebijaksanaannya Mbah Maimoen ini piawai dalam menyelesaikan isu-isu yang terjadi pada masa itu, seperti masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan keragaman. Gagasan dan pemikiran KH Maimun Zubair selama hidupnya, ini tentu mempengaruhi banyak kalangan tidak terkecuali kalangan politik. Terlebih ia juga merupakan bagian dari politik. Selama bergabung dengan politik, beberapa masalah pernah terjadi. Dalam hal inilah KH Maimun Zubair memberikan respon untuk menengahi permasalahan agar dapat terselesaikan dengan baik. Melalui pemikiran yang ia tuangkan dalam komunikasi dakwah ia memberikan respon terhadap masalah yang terjadi dalam politik agar anggota politik tetap kondusif dan tetap menjalankan syariat Islam. Melalui fatwa-fatwanya KH Maimun Zubair memberikan jalan untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam politik. Sebagai salah satu kiai yang aktif dalam

⁷ Moh. Zuhri, *KH. Maimun Zubair: Ulama, Pejuang, Politikus* (Yogyakarta: LKiS, 2019), hlm. 85.

politik, banyak para peneliti yang telah mencoba untuk menjadikan sosok KH Maimun Zubair sebagai objek penelitian, yang mengkaji tentang komunikasi dakwah Politik KH Maimun Zubair. Kemudian Aflah yang mengkaji pemikiran KH Maimun Zubair mengenai pemikiran KH Maimun Zubair tentang Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal serta Implementasinya di Indonesia. Tentang pola kepemimpinan K.H. Maimun Zubair dalam mengelola pengembangan lembaga pendidikan di PP Al-Anwar Sarang Rembang Jateng. Terkait dengan politik, penelitian yang menjadikan KH Maimun Zubair sebagai objek penelitian dilakukan oleh Muazaroh & Subaidi, yang mengangkat tema penelitian cultural capital dan kharisma kiai dalam wacana partai politik.

Ulama NU melaksanakan rapat di Pesantren Langitan, Jawa Timur membahas keadaan Negara yang sangat kacau ini. Mereka sepakat bahwa Presiden Soeharto harus mundur dari jabatannya. Pemikiran itu disepakati oleh hampir semua ulama yang hadir, antara lain Kiai Idris Marzuki, Kiai Abdullah Fakhri, Kiai Sholeh Qosim, Kiai Muchit Muzadi dan sebagainya. Tetapi hanya K.H. Maimoen Zubair dari Sarang yang menolak keputusan itu, dengan alasan presiden sebagai Waliyul Amri tidak bisa dimakzulkan di tengah jalan begitu saja, kecuali dengan tegas menyatakan ketidakmampuannya.⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Orde Baru yang di pimpin Presiden Soeharto adalah sejarah buruk dalam pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan. Praktik-praktik curang yang dilakukan pemerintah untuk memperkaya diri sendiri dan kerabat terdekat, membuat masyarakat kesal. Masa Orde Baru juga masa di mana ulama “ditindas” secara sosial maupun secara politik, Ulama harus menerima program-program yang digagas oleh pemerintah, jika tidak mengikutinya maka ancaman kekerasan, pengucilan hingga pemenjaraan pun di depan mata. Ditambah lagi lambatnya pemerintah dalam menangani Krisis Moneter yang semakin membuat rakyat semakin tercekik. Berakhirnya pemerintahan presiden Soeharto karena dilatarbelakangi krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial budaya dan keamanan Indonesia yang semakin tidak menentu. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia

⁸ Saiful Anam, “Peran KH. Maimun Zubair dalam Politik Islam Kontemporer,” *Jurnal Ilmu Politik dan Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (2020): 132.

PERISTIWA PENGKUDETAAN PRESIDEN SOEHARTO PADA TAHUN 1998: STUDI PEMIKIRAN K.H. MAIMOEN ZUBAIR

mengakibatkan turunnya nilai tukar mata rupiah terhadap dollar hingga menyebabkan naiknya kebutuhan sehari-hari, banyak terjadinya PHK di perusahaan-perusahaan.

Mahasiswa sebagai kaum intelektual menuntut Soeharto turun dari kursi pemerintahan setelah 32 tahun memimpin Indonesia. Berbagai aksi unjuk rasa dilakukan hampir di seluruh Kota Besar di Indonesia, puncak dari unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Indonesia adalah kematian empat mahasiswa Trisakti yang di tembak oleh aparat keamanan saat melakukan unjuk rasa. Aksi mahasiswa yang terjadi sepanjang Mei 1998 menemukan momentumnya pada tanggal 12 Mei 1998, di kampus Universitas Trisakti di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta. Aksi damai mahasiswa Universitas Trisakti berubah menjadi tragedi kerusuhan antara pihak mahasiswa dan beberapa oknum polisi serta TNI. Dan peristiwa ini telah terjadinya kerugian yang cukup besar pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Yang berarti peristiwa kerusuhan ini menentang adanya nilai Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia, karena dampak dari kejadian ini sangat merugikan banyaknya masyarakat Indonesia. Kerusuhan ini juga melanggar adanya peraturan perundang-undangan dan salah satu nilai yang tercantum dari dasar negara kita yaitu Pancasila.

KH Maimoen Zubair ini selama hidupnya telah merawat komitmennya terhadap politik kebangsaan di Indonesia. Melalui banyak pemikiran dan kebijaksanaannya Mbah Maimoen ini piawai dalam menyelesaikan isu-isu yang terjadi pada masa itu, seperti masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan keragaman. Gagasan dan pemikiran KH Maimun Zubair selama hidupnya, ini tentu mempengaruhi banyak kalangan tidak terkecuali kalangan politik. Terlebih ia juga merupakan bagian dari politik. Selama bergabung dengan politik, beberapa masalah pernah terjadi. Dalam hal inilah KH Maimun Zubair memberikan respon untuk menengahi permasalahan agar dapat terselesaikan dengan baik. Melalui pemikiran yang ia tuangkan dalam komunikasi dakwah ia memberikan respon terhadap masalah yang terjadi dalam politik agar anggota politik tetap kondusif dan tetap menjalankan syariat Islam. Melalui fatwa-fatwanya KH Maimun Zubair memberikan jalan untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam politik.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Gafur, *Hari-hari Terakhir Seorang Presiden*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.

- Benedict Anderson, “**Exit Suharto,**” *Asia-Pacific Journal*, Volume 6 Issue 6: menganalisis kesudahan rezim Soeharto dari perspektif politik dan budaya politik era Reformasi, 2025.
- Izzah, L. “*Pemerintah Indonesia awal Orde Baru*”. Tidak diterbitkan. Laporan penelitian. Jember: Universitas Jember, 1995.
- Kompas, “*Sejarah Tragedi Penembakan Mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998*”, mengonfirmasi serpihan peluru kaliber 5,56 mm ditemukan dalam tubuh salah satu korban, serta bahwa penyidik belum berhasil mengungkap pelaku utama, 2022.
- Moh. Zuhri, KH. *Maimun Zubair: Ulama, Pejuang, Politikus*, Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Saiful Anam, “Peran KH. Maimun Zubair dalam Politik Islam Kontemporer,” *Jurnal Ilmu Politik dan Keislaman*, Vol. 5, No. 2 2020.
- M. Zahrin Piliang, “*Pengelolaan Ekonomi Indonesia: Pengalaman Orde Baru*”, *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.2 No. 1: menjelaskan intervensi ekonomi Soeharto melalui liberalisasi, hubungan dengan IMF, dan dampak sosial-ekonomi jangka panjang, 2023.